SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
NOMOR 557 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN NOMOR 19 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 938 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Tahun 2026, telah dilakukan penggantian pejabat struktural di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap struktur Tim Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 938 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Tahun 2026;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN NOMOR 19 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN.

KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
Pada tanggal 1 Juli 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
ttd.
THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Yuliana Christine Handayani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
NOMOR 557 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN NOMOR 19 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN.

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1.	Theresia Mahuse	Ketua KPU Provinsi Papua Selatan	Pengarah
2.	Helda Richarda Ambay	Anggota KPU Provinsi Papua Selatan	Pengarah
3.	Jufri Toatubun	Anggota KPU Provinsi Papua Selatan	Pengarah
4.	Daniel Ndiwaen	Anggota KPU Provinsi Papua Selatan	Pengarah
5.	Alson Markus Kambu	Anggota KPU Provinsi Papua Selatan	Pengarah
II	KETUA		
1.	Jimmy Winarta	Sekretaris KPU Provinsi Papua Selatan	Ketua
III	ANGGOTA		
A	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Yuliana Christine Handayani	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Papua Selatan	Koordinator merangkap Anggota
2.	Oktovina Sattu Pasau	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan	Anggota

		Pemilu KPU Provinsi Papua Selatan	
3.	Fredi Damayanto Ragainaga	Fungsional	Anggota
4.	Hendra Nurdiansyah	Pelaksana	Anggota
5.	Gare'ge' Arung Allo	Fungsional	Anggota
6.	Suci Paska M.Y Rahalus	Fungsional	Anggota
B	TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
1.	Djumadi	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Papua Selatan	Koordinator merangkap Anggota
2.	Rudy Yogaswara	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi Papua Selatan	Anggota
3.	Abdullah Rahman	Pelaksana	Anggota
4.	Wirawan Prasasto	Fungsional	Anggota
5.	Dwi Cahyono	Fungsional	Anggota
C	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	Chairunnissa Arief	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Papua Selatan	Koordinator merangkap Anggota
2.	Jorry Mandang	Pelaksana	Anggota
3.	Dewi Nurhidayah	Fungsional	Anggota
4.	Dhany Marienda Wicaksono	Fungsional	Anggota
5.	Rendy Christian Betaubun	Tenaga Administrasi	Anggota
D	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	Marselus C. Eddy Rianto	Kepala Bagian Keuangan Umum dan LogistikKeuangan Umum dan Logistik KPU Provinsi Papua Selatan	Koordinator merangkap Anggota
2.	Rama Apriarosadi Ramdani	Kepala Sub Bagian Keuangan KPU Provinsi Papua Selatan	Anggota
3.	Imelda Lamarubun	Pelaksana	Anggota
4.	Widya Helena Manurung	Fungsional	Anggota
5.	Atif Fariz	Fungsional	Anggota
6.	Indra Hariyanto	Fungsional	Anggota
7.	Roferio Clif Alfons	Tenaga Administrasi	Anggota

E	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Riko Turangan	Kepala Sub Bagian Hukum KPU Provinsi Papua Selatan	Koordinator merangkap Anggota
2.	Margaretha	Pelaksana	Anggota
3.	Cahaya Purnama Indah Gultom	Pelaksana	Anggota
4.	Topan Mandari Parerungan	Pelaksana	Anggota
5.	Yohanis Anto Amkai	Tenaga Administrasi	Anggota
F	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Sherly Novieta Christina Thanos	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik KPU Provinsi Papua Selatan	Koordinator merangkap Anggota
2.	Sonny Christian	Pelaksana	Anggota
3.	Muhammad Rafly	Fungsional	
4.	Alfrida Nari	Fungsional	Anggota
5.	Kessya Multy Febriany Gura	Tenaga Administrasi	Anggota
6.	Rayis Dambudjai	Tenaga Administrasi	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN

ttd.

THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Yuliana Christine Handayani